|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANALISA 1 (1) (2021)  **JURNAL ANALISA**  <http://ibarj.com> | | |  |
| **PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK)**  **Zulvi Anisatus Sholeha1, Indah Wahyu F.2, Zaenuddin Imam 3**  1Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  2Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  3Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | | | | |
| **Info Articles**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Keywords:*  *Corporate Social Responsibility, Executive Compensation, Political Connection, Tax Avoidance.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Abstract**  *This study aims to determine the effect of Corporate Social Responsibility, Excective Compensation, and Political Connections on Tax Avoidance in manufacturing companies in the sub-sector cunsomer goods industry listed on the IDX during 2016 – 2019. Taxes contribute greatly to state revenues. Companies often take action to reduce their tax burden. One of these action is tax avoidance.*  *The sample consumer goods industry sub-sector manufakturing company selection method used in this study was purposive sampling method with a total sample of 76 observations. The data used is secondary data in the form of financial reports published on the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the website*[*www.idx.co.id*](http://www.idx.co.id/)*. The results of the study show that corporate social responsibility, executive compensation, and political connections have a simultaneous effect on tax avoidance . The partial test results show that (1) corporate social responsibility has a negative effect on tax avoidance, (2) executive compensation has no effect on tax avoidance, (3) political connections have a positive effect on tax avoidance .* | | |
| Korespondensi: zulviansatuss04@gmail.com | | | ISSN XXX-XXX | |

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara yang memiliki fungsi sebagai pendaaan atas pengeluaran negara dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Kewajiban pajak merupakan kewajiban konstitusi bagi seluruh masyarakat Indonesia, wajib pajak diharapkan sadar akan melakukan kewajiban konstitusi tersebut dengan sukarela(Mulyani, 2020).Freise, dkk (dalam Lanis dan Richardo, 2012) berdasarkan perspektif sosial, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik.

**Tabel 1**

**Tabel penerimaan pajak dan bukan pajak tahun 2015 – 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Penerimaan Pajak | Penerimaan Bukan Pajak |
| 2016 | 1.285,0 T | 262,0 T |
| 2017 | 1.343,5 T | 311,2 T |
| 2018 | 1.518,8 T | 409,3 T |
| 2019 | 1.643,1 T | 386,3 T |
| 2020 | 1.865,7 T | 367,0 T |

*Sumber :* <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 penerimaan negara dari perpajakan lebih tinggi dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Karena itu, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan kemudahan pelaporan, kemudahan pembayaran, hingga penurunan tarif pajak merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Insentif pajak berupa fasilitas PPh untuk WP badan Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 tahun 2020 mengenai Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka menjadi 22% diharapkan mampu menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah. Derektur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan bahwa penghindaran pajak muncul karena transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, temuan Tax Justice Network mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional dengan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal tersebut bertujuan untuk tidak melaporkan keuntungan yang diperoleh di negara tempat berbisnis sehingga korporasi dapat membayar beban pajak yang lebih sedikit. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan aset dan pendapatan ke luar negeri (nasional.kontan.co.id, diakses pada tanggal 31 Desember 2020).

Sebagai contoh menurut laporan Global Witness pada tahun 2019 bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. PT. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya yaitu Coaltrade Services International yang berada di Singapura sejak tahun 2017. Adaro diduga mengatur sedemikian rupa sehingga mereka membayar pajak sebesar US$ 125 juta atau setara degan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharunya dibayarkan di Indonesia. Manurut Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan, PT. Andaro melakukan penghindaran pajak dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih kecil (finance.detik.com, diakses pada tanggal 31 Desember 2020).

Berdasarkan kasus di atas, diketahui bahwa penghindaran pajak dikatakan hal yang unik dan rumit karena tidak ada peraturan yang dilanggar tetapi hal ini tidak diinginkan pemerintah. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai upaya perusahaan memperhatikan pengaruh lingkungan dan sosial atas cakupan operasinya, dengan meminimalkan kerugian tetapi memaksimalkan manfaatnya, Pemerintah UK (dalam Lanis dan Richardson, 2012). Lanis dan Richardson (2012) dalam penelitian yang menghubungkan antara CSR dengan Penghindaran Pajak menenyatakan bahwa semakin maksimum taraf tanggung jawab sosial perusahaan makan semakin minim tingkat penghindaran pajaknya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada para *stakeholder*. Perusahaan yang mencoba melakukan penghindaran pajak akan membuat kehilangan legalitasnya di mata *stakeholder*. CSR dan Pajak memiliki persamaan peran untuk andil dalam kegiatan sosial masyarakat. Perusahaan yang memahami pentingnya CSR juga akan paham kontribusinya untuk membayar pajak bagi masyarakat umum, Yoehana (dalam Jati dan Wiguna, 2017).

Kompensasi eksekutif dapat dijadikan sebagai cara terbaik untuk melaksanakan efisiensi pajak perusahaan. Imbalan yang diberikan membuat para eksekutif untuk menghasilkan kinerja dan kebijakan yang memuaskan kepada perusahaan termasuk memaksimalkan laba. Kebijakan yang dihasilkan salah satunya yaitu mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak. Kebijakan penghindaran pajak akan dilakukan eksekutif dengan tujuan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang berbeda. Rego dan Wilson (2012), Hanafi dan Hartono (2014) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014), Dewi dan Maria (2015) memberikan hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Indonesia seringkali diterpa isu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Banyaknya kasus korupsi mengalihkan perhatian masyarakat kepada perusahaan yang menjalin hubungan dengan pejabat negara**,** Faccio (dalam Apsari dan Supadmi, 2018)Perusahaan perlu menemukan serta memanfaatkan peluang disekitarnya untuk menyusun strategi bersaing yang tepat, Leuz dan Gee (dalam Lestari dan Putri, 2017). Memanfaatkan peluang dapat memberikan keuntungan untuk memperluas jaringan, salah satunya koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya hal ini karena risiko untuk diperiksa lebih kecil bahkan tidak akan ada pemeriksaan dari badan pemeriksa pajak (Mulyani dkk, 2014). Terdapat perbedaan hasil antara hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance* pada penelitian terdahulu. Butje dan Tjondro, 2014 (dalam Munawaroh dan Ramdany, 2019) mengungkapkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Dharma dan Noviari, 2015 (dalam Munawaroh dan Ramdany, 2019) yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh antara koneksi politik dengan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI sebagai sampel. Pemilihan sampel ini didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu wajib pajak yang beberapa kali difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan bukti empiris dari dampak CSR, Kompensasi Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* oleh perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

**TINJAUAN PUSTAKA**

***Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate social responsibility* ialah suatu kewajiban perusahaan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, pekerja perusahaan beserta keluarganya, serta masyarakat luas dalam rangka membangun kualitas hidup, Rahman (dalam Munawaroh dan Ramdany, 2019). CSR merupakan salah satu cara mendapat legitmasi dari masyarakat. Perusahaan akan mendapat reputasi tinggi di mata masyarakat apabila tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya tinggi. Proksi *corporate social responsibility* (CSR) dalam penelitian ini menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR disclosure. Pengukuran variabel dilakukan dengan *checklist* indikator pengungkapan CSR yang telah dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Terdapat 91 item yang dikeluarkan oleh GRI G4. Apabila item y diungkapkan maka diberi nilai 1 dan apabila item y tidak diungkapkan diberi nilai 0. Adapun rumus yang digunakan alam perhitungan CSRI sebagai berikut:

Dimana:

CRSIj = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

∑ Xi = Nilai 1 jika item y diungkapkan; 0 jika item y tidak diungkapkan.

ni = Jumlah item untuk perusahaan I, < 91

**Kompensasi Eksekutif**

Dessler (dalam Susanto, 2017:34) mengatakan bahwa kompensasi merupakan bentuk pembayaran atau imbalan yang dihibahkan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Kompensasi dapat berupa insentif, bonus, komisi, asuransi, dan uang liburan. Tujuan diberikannya kompensasi agar eksekutif lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memenuhi keinginan *principal* untuk memperoleh laba yang maksimal. Proksi yang digunakan untuk menngukur kompensasi eksekutif dalam penelitian ini ialah logaritma natural dari kompensasi yang diterima oleh dewan direksi, komisarin, maupun manajemen kunci selama satu tahun. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Amstrong, dkk (2015) menggunakan proksi logaritma natural total kompensasi setahun dengan rumus.

**Koneksi Politik**

Purwanti dan Sugiyarti (dalam Ayuningtyas dan Harymawan, 2020:4) menjelaskan bahwa koneksi politik ialah situasi dimana terjalin hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan politik yang digunakan untuk mencapai hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perseroan dengan koneksi akan lebih nekat melakukan usaha meminimalkan pajaknya karena kemungkinan untuk diperiksa lebih kecil bahkan tidak akan menghadapi pemeriksaan oleh pihak berwajib, Chaney dkk (dalam Lestari dan Putri, 2017). Pengukuran variabel ini menggunakan dummy seperti yang digunakan oleh Wati, dkk (2017), angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan koneksi politik mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk(2017), yaitu:

1. Jika terdapat seorang direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik,
2. Jika terdapat seorang direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,
3. Jika ada salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

***Tax Avoidance***

Pohan, 2016 (dalam Mulyani dan Nugraha, 2019) menjelaskan bahwa *tax avoidance* ialah salah satu usaha bentuk penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak berbenturan dengan ketetapan perpajakan. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak ini ialah memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Dyreng, dkk (dalam Lestari dan Putri, 2017) penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan CETR karena CETR tidak terpengaruhi oleh perubahan estimasi. Sementara itu metode ini juga diterima dalam *literature* akuntansi (Rego & Wilson, 2012). Penghindaran pajak yang dilakukan nilai CETR yang tinggi menggambarkan bahwa entitas tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah, dan sebaliknya. Perhitungan CETR dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzmen (2010) dijabarkansebagai berikut:

**METODE PENELITIAN**

**Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan area generalisasi yang terdapat objek atau subjek yang memiliki tanda atau ciri tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari setelahnya ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini ialah sebanyak 63 perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2019.

Sampel merupakan bagian dari jumlah ciri yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Arkunto (dalam Siyoto dan Sodik, 2015:64) sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 – 2019. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dimana nantinya peneliti menentukan sampel dengan pertimbangan atau kriteria khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (dalam Mamik, 2015:53) *sampling purposive* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ialah:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019.
2. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan lengkap dalam periode 2016 – 2019.
3. Perusahaan dengan mata uang rupiah dalam laporan keuangan tahunannya periode 2016 – 2019.
4. Perusahaan yang mengalami laba selama tahun 2016 – 2019. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengalami kerugian akan mengakibatkan nilai CETR negatif sehingga akan menyulitkan dalam perhitungan.
5. Perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (CSR) selama periode tahun 2016 – 2019.

**Tabel 2. Prosedur Pemilihan Sampel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Jumlah Perusahaan** |
| 1. | Perusahaan Manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019. | 63 |
| 2. | Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunan lengkap dalam periode 2016 – 2019. | (31) |
| 3. | Perusahaan dengan mata uang selain rupiah dalam laporan keuangan tahunannya periode 2016 – 2019. | - |
| 4. | Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2016 – 2019. | (11) |
| 5. | Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian pada periode 2016 – 2019 | (2) |
| **Jumlah sampel penelitian** | | **19** |
| **Jumlah keseluruhan data penelitian selama tiga tahun (4x19)** | | **76** |
| **Jumlah data yang diteliti** | | **76** |

*Sumber*: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Jenis dan Sumber data**

Data Perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdapat di Galeri Bursa Efek Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2016-2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif atau data berupa angka yang diolah menggunakan rumus.

X1

**H1**

X2

**Y**

**H2**

**H3**

X3

**H4**

**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

Keterangan:

X1 = *Corporate Social Responsibility* (CSR)

X2 = Kompensasi Eksekutif

X3 = Koneksi Politik

Y = *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Stastistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statistics** | | | | | | |
|  | | CSR | Kompensasi Eksekutif | Koneksi Politik | Tax Avoidance |
| N | Valid | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | ,13468 | 24,18955 | ,54054 | ,28069 |
| Std. Deviation | | ,058173 | 1,653605 | ,501756 | ,139612 |
| Minimum | | ,011 | 18,682 | ,000 | ,087 |
| Maximum | | ,264 | 27,599 | 1,000 | ,790 |

Sumber data : Output SPSS , data diolah (2021).

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, variabel dependen yaitu *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,28069 atau sebesar 28,069% dengan standar deviasi 0,139612. Berdasarkan lampiran 2 data-data penelitian diperoleh nilai minimum variabel *tax avoidance* pada perusahaan PT. Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2018 sebesar 0,087, dan nilai maksimum *tax avoidance* perusahaan PT. Tempo Scan Pacifik Tbk (TSPC) tahun 2018 sebesar 0,790. Variabel independen *corporate social responsibility* (CSR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,13468 atau sebesar 13,468% dengan standar deviasi 0,058173. Perusahaan yang memiliki nilai *corporate social responsibility* terkecil adalah PT Tempo Scan Pacifik Tbk (TSPC) yaitu 0,011 pada tahun penelitian 2018 dan 2019. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai *corporate social responsibility* terbesar yaitu PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar 0,264 pada tahun penelitian 2019.

Variabel independen kompensasi eksekutif mempunyai nilai rata-rata sebesar 24,18955 dengan dengan standar deviasi 1,653605. Perusahaan yang memiliki nilai kompensasi eksekutif terkecil yaitu PT Gudang Garam Tbk (GGRM) sebesar 18,682 pada tahun penelitian 2018. Sedangkan perusahaan yang memiliki kompensasi eksekutif terbesar yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) sebesar 27,599 pada tahun penelitian 2018. Variabel independen koneksi politik menggunakan variabel dummy dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 memiliki nilai rata-rata 0,54054 atau 54,054% dengan standar deviasi 0,501756.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data disajikan pada tabel 4:

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | | | |
|  | | | Unstandardized Residual |
| N | | | 74 |
| Normal Parametersa,b | Mean | | ,0000000 |
| Std. Deviation | | ,12764768 |
| Most Extreme Differences | Absolute | | ,131 |
| Positive | | ,131 |
| Negative | | -,064 |
| Test Statistic | | | ,131 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | ,003c |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | Sig. | | ,162d |
| 99% Confidence Interval | Lower Bound | ,052 |
| Upper Bound | ,273 |
| a. Test distribution is Normal. | | | |
| b. Calculated from data. | | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | | |
| d. Based on 74 sampled tables with starting seed 2000000. | | | |

Sumber data : Output SPSS , data diolah (2021).

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai sig *monte carlo P-values* sebesar (0,162) yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan berdasrkan kriteria pengambilan keputusan Uji Normalitas data berdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel. Multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai *variance inflatiation factor* (VIF). Jika nilai *tolerace* > 0,01 dan nilai VIF < 10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel 5:

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolineritas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | |
| Model | | Collinearity Statistics | | |
| Tolerance | VIF | |
| 1 | CSR | ,741 | 1,349 | |
| Kompensasi Eksekutif | ,651 | 1,535 | |
| Koneksi Politik | ,861 | 1,162 | |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | |

Sumber : *Output*  SPSS, data diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (bebas).

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson | |
| 1 | ,532a | ,283 | ,273 | ,10837754 | 2,177 | |
| a. Predictors: (Constant), LAG\_RES | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Unstandardized Residual | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | | | |

Sumber : *Output* SPSS

Berdasarkan tabel 6 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watsin sebesar 2,177, yang terletak diantara dU (1,7079 ) s/d 4-dU (2,291). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

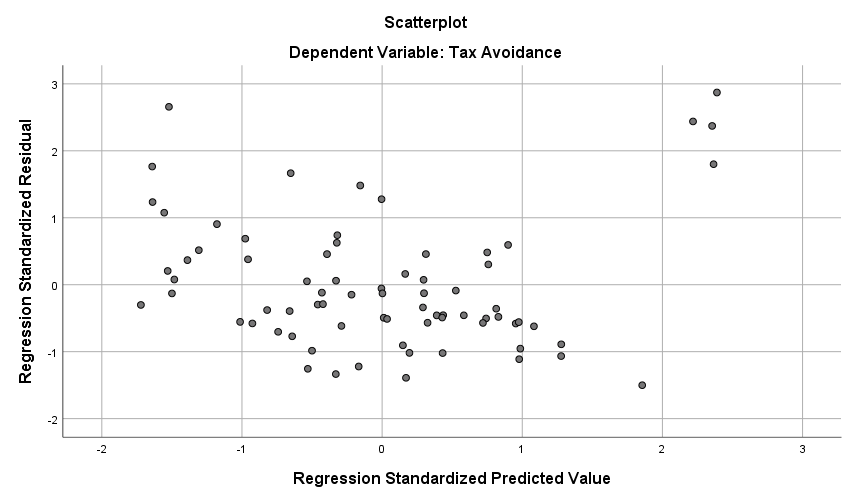
**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta |  |  | |
| 1 | (Constant) | -,017 | ,145 |  | -,118 | ,906 | |
| CSR | -,689 | ,175 | -,494 | -3,946 | ,000 | |
| Kompensasi Eksekutif | ,009 | ,007 | ,175 | 1,310 | ,195 | |
| Koneksi Politik | ,001 | ,019 | ,003 | ,030 | ,976 | |
| a. Dependent Variable: abs\_res | | | | | | | |

Sumber : *Outpu*t SPSS,data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel di atas diketahui bahwa hasil signifikan dari variabel CSR sebesar 0,000 < 0,05, Kompensasi Eksekutif dengan nilai sig 0,195 > 0,05, sedangkan koneksi politik dengan nilai sig 0,967 < 0,005. Pada variabel CSR terjadi heteroskedastisitas, hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan grafik *scatterpot* sebagai berikut:

**Gambar 1. *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : *Outpu*t SPSS,data diolah (2021)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di bawah dan di atas atau sekitar angka 0, penyebaran titik-titik juga tidak membentuk pola bergelombang menyempit kemudian melebar dan menyempit kembali dan tidak berpola sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data dari model regresi dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 8:

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | ,048 | ,253 |  | ,190 | ,849 | |
| CSR | -,798 | ,305 | -,333 | -2,621 | ,011 | |
| Kompensasi Eksekutif | ,012 | ,011 | ,147 | 1,082 | ,283 | |
| Koneksi Politik | ,076 | ,033 | ,271 | 2,303 | ,024 | |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | | | |
|  | | | | | | |

Berdasarkan hasil tabel 8 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

**Y = 0,048 - 0,798 X1 + 0,012X2 + 0,076 X3 + e**

keterangan :

Y = *Ta*x Avoidance

X­1 = *Corporate Social Responsibility*

X2 *=* Kompensasi Eksekutif

X3 = Koneksi Politik

Persamaan regresi yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

* + 1. **= 0,048** artinya jika *Corporate Social Responsibility* (X1), Kompensasi Eksekutif (X2), dan Koneksi Politik (X3) diamsusikan konstan pada nilai 0 maka variabel *Tax Avoidance* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar **0,048.**
    2. **= -0,798** artinya *Corporate Social Responsibility* (X1) bernilai negatif, dimana terdapat hubungan yang negatif antara *Corporate Social Responsibility* (X1) dengan *Tax Avoidance* (Y). Apabila *Corporate Social Responsibility* (X1) dinaikkan 1 *score*, maka *Tax Avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar **0,798.**
    3. **= 0,012** artinya Kompensasi Eksekutif (X2) bernilai positif, dimana terjadi hubungan yang positif antara Kompensasi Eksekutif (X2) dengan *Tax Avoidance* (Y). Apabila Kompensasi Eksekutif (X2) dinaikkan 1 *score*, maka *Tax Avoidance* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar **0,012.**
    4. **= 0,076** artinya Koneksi Politik (X3) bernilai positif, dimana terjadi hubungan yang positif antara Koneksi Politik (X3) dengan *Tax Avoidance* (Y). Apabila Koneksi Politik (X3) dinaikkan 1 *score*, maka *Tax Avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar **0,076.**

**Uji Hipotesis**

**Uji F ( Uji Simultan )**

**Tabel 9. Hasil Uji F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
| 1 | Regression | ,233 | 3 | ,078 | 4,579 | ,006b | |
| Residual | 1,189 | 70 | ,017 |  |  | |
| Total | 1,423 | 73 |  |  |  | |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, CSR, Kompensasi Eksekutif | | | | | | | |

Sumber *: Output* SPSS,data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa nilai sig 0,006 < 0,05 dan nilai F hitung 4,579 > 2,73. Maka disimpulkan bahwa *Corporate Social responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Koneksi politik secara bersama-sama (simultan) berpengaruh variabel dependen yaitu terhadap *Tax Avoidance*.

**Uji t (Parsial)**

**Tabel 10. Hasil Uji T**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | ,048 | ,253 |  | ,190 | ,849 |
| CSR | -,798 | ,305 | -,333 | -2,621 | ,011 |
| Kompensasi Eksekutif | ,012 | ,011 | ,147 | 1,082 | ,283 |
| Koneksi Politik | ,076 | ,033 | ,271 | 2,303 | ,024 |
| a. Dependent Variable: Tax Avoidance | | | | | | |

Sumber *: Output* SPSS,data diolah (2021)

1. Berdasarkan tabel 10 didapatkan hasil bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai T hitung sebesar 2,621 > T tabel 1,99444 dengan nilai signifikan 0,011 > 0,05, maka menunjukan bahwa Ha diterima dan Ho diterima. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Berdasarkan tabel 10 didapatkan bahwa variabel kompensasi eksekutif dengan nilai T hitung sebesar 1,082 < T tabel 1,99444 dengan nilai sig 0,283 > 0,05, maka menunjukkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Variabel Kompensasi Eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Berdasarkan tabel 10 didapatkan hasil bahwa variabel Koneksi Politik dengan T hitung sebesar 2,303 > T tabel 1,99444 dengan nilai sig 0,024 < 0,05, maka menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Variabel Koneksi Politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

**Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 11 Hasil Koefisien Determinasi (R2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summary** | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | |
| 1 | ,405a | ,164 | ,128 | ,130354 | |
| a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, CSR, Kompensasi Eksekutif | | | | | |
| a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif, CSR | | | | |

Sumber : Output SPSS,data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji determinasi (R2) diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R2*) sebesar 0,128 yang dapat diartikan bahwa 12,8% *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh *Corporate Social responsibility*, Kompensasi Eksekutif, dan Koneksi politik sedangkan 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Corporate social responsibility* yang direpresentasikan terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah cenderung tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini karena CSR merupakan suatu tanggung jawab sosial yang sejalan dengan fungsi pajak. Karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan sosial suatu perusahaan maka semakin rendah praktik penhindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.
2. Kompensasi eksekutif yang dipresentasikan terbukti tidak memiliki memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi berupa bonus, tunjangan, dan gaji yang diberikan kepada manajemen tidak menjamin manajemen akan melakukan praktik penghindaran pajak. Berbeda apabila *stakeholder* memberikan kompensasi berupa kepemilikan saham yang dapat menimbulkan rasa memiliki perusahaan oleh manajemen dimana mereka dapat menekan biaya pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak.
3. Koneksi politik yang dipresentasikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memberikan keuntungan dalam kecilnya tingkat pemeriksaan pajak oleh badan pemeriksa pajak. Hal tersebut membuat perusahaan yang memiliki koneksi politik akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak.

**SARAN**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas berikut adalah saran yang dapat disampaikan :

1. Bagi Investor

Investor sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh perusahaan pada laporan tahunan sebagai pertimbangan kebijakan dalam penanaman modal.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain di luar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini dan juga menambah tahun penelitian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance". *E- Jurnal Akuntansi*, *25*, 1481.

Armstrong, C.S., J.L. Blouin, and D.F. Larcker. 2015. "Corporate Governance, Incentive, and Tax Avoidance". Journal of Accounting and Economics, 60 (1), pp: 1-17.

Ayuningtyas, E. S., & Harymawan, I. (2020). *KONEKSI POLITIK DALAM BISNIS*. Airlangga University Press.

Dewi, Gusti Ayu Pradnyanita dan Maria M Ratna.2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13 (1), hal.50-67.

Dharma Nyoman B, S., & Noviari, N. (2017). "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi*, *18*(1), 529–556.

Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. The American Economic Review, 96 (1): 369- 386.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, U. Dan Hartono, P. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif pada Penghindaran Pajak Perusahaan". Diponogoro Journal of Accounting, 3 (2), hal.1162-1172.

Hanlon, M., & Heitzman, S.,. (2010) “A Review of Tax Research”. Journal of Accounting and Economucs, 50,127-178.

Hatmawan, A, A., & Riyanto, S. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

https://vapemagz.co.id/news/mengaku-rugi-bentoel-ternyata-hindari-pajak/ (diakses pada tanggal 31 Desember 2020)

Jati, I.K., & Wiguna, I. P. P. (2017). “Pengaruh Corporate Social Responsobility, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi,* 21 (1), 418-446.

Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : an Empirical Analysis". Journal of Accounting and Public Policy. pp. 86-108.

Lestari, Ayu G W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, *18*(3), 2028–2054.

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (Cetakan Pertama). Zifatama Publisher. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2018). Yogyakarta: CV ANDI OFFSET

Radyanti, Maria R. Nindita. (2014). *Sustainable Business dan Corporate Social* *Responsibility (CSR)*. Menara Batavia 2nd Floor.

Metha, Cyrus R. dan Patel, Nitin R. 2013. *IBM SPSS Exact Tests.*

Mulyani, S., Darmito, dan Endang, M. W. 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Pada Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)". Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya, 1 (2), hal.1-9.

Mulyani, M, I., & Nugraha, S, D. (2019). "Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif , Kompensasi Eksekutif , Capital Intensity, dan Sales growth terhadap Tax Avoidance". *0832*(2), 301–324.

Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). "Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi*, *8*(2), 109–121.

Puspita, Slivia Ratih dan Harto, Puji. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". Diponegoro Journal Of Accounting, 3 (2), hal. 1-13.

Rahman, R. (2009.). Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan. Yogyakarta.: Media Pressindo.

Rego, S.O. dan R. Wilson. 2012. Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50 (3), pp: 775-810.

Santoso, Y, I. 2020. *Sri Mulyani: Bayar Pajak Merupakan Kewajiban Konstitusi Seluruh Warga Indonesia.* https://newssetup.kontan.co.id/ (diakses pada tanggal 19 Desember 2020).

Santoso, Y. I. 2020. *Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp. 68,7 Triliiun dari Penghindaran Pajak.* <https://nasional.kontan.co.id> (diakses pada tanggal 31 Desember 2020).

Sari. (2014). “Kompensasi Eksekutif dan Kinerja Operasional Perbankan Indonesia”. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1-7. ISSN: 2337-3806

Siyoto, D. S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Cetakan 1). Literasi Media Publishing.

Sugiyanto, D. 2019. *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke* *Andaro*. https://finance.detik.com/ (diakses pada tanggal 31 Desember 2020).

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Susanto, Y. (2017). *Peran Kepemimpinan dalam Pengelolaan Koperasi* (Cetakan Pertama). CV BUDI UTAMA.

Wati, L. N. 2017. "Board of commissioner’s effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia”. Pertanika Journal Social Sciences & Humanities, 25(S), pp. 255-270.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (diakses pada tanggal 21 Desember 2021)